

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM MEMPERTAHANKAN DESA MANDIRI (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban)

Mangihut Siregar¹, Frederik Fernandez², Yemy Tristanto³

¹⁻³Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

Email: mangihut@uwks.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2889>

Abstract

Community participation plays an important role in every program launched by the government. Community participation can be carried out in groups or individually. Through participation, the interests of society will be accommodated. This research was conducted using a qualitative descriptive method by collecting data by observation, interviews and documents. The results of the study show that community participation carried out in Sambonggede Village, Merakurak District in maintaining an independent village has a very important role. Community participation that has been carried out by groups and individuals through participation in decision making, participation in the implementation of activities, participation in development monitoring and evaluation, and participation in the utilization of development results.

Keywords: *Political participation, community participation, independent village.*

Abstrak

Partisipasi masyarakat menjadi peran penting dalam setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah. partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara kelompok maupun individu. Melalui partisipasi maka kepentingan masyarakat akan terakomodir. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak dalam mempertahankan Desa mandiri memiliki peranan yang sangat penting. Partisipasi masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh kelompok maupun individu melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Kata Kunci: Partisipasi politik, partisipasi masyarakat, desa mandiri.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya tidak bisa lepas dari aktivitas politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap aktivitas politik yang dilakukan oleh manusia tentunya dituntut untuk bisa berpartisipasi dalam

mewujudkan suatu tujuan. Namun sering kali kita menemukan bahwa setiap masyarakat yang sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban untuk dapat berpartisipasi dalam berpolitik mendapatkan berbagai kendala.

Banyak yang menilai bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik pada saat pemilihan. Padahal sejatinya dalam kehidupan berdemokrasi, masyarakat mempunyai hak untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa.

Partisipasi politik masyarakat dapat terwujud berupa audiensi ataupun demonstrasi, langsung ataupun tidak langsung, cara yang legal maupun illegal, secara spontan maupun berkesinambungan. Hal ini tentunya tergantung pada karakteristik yang dimiliki dari setiap masyarakat. Masyarakat seringkali dijadikan sebagai objek politik dalam momentum pemilihan umum. Padahal sejatinya masyarakat mempunyai hak untuk dapat berpartisipasi dan dapat menunjukkan eksistensinya dalam berbagai program yang akan dijalankan pemerintah. Sehingga masyarakat tidak hanya dinilai sebagai objek politik saja, namun masyarakat menjadi subjek atau pelaku politik.

Adanya program pemerintah yang dapat melibatkan masyarakat tentu menjadi nilai plus dalam ranah partisipasi politik masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi secara individu maupun kelompok masyarakat. Partisipasi politik ini mempunyai peranan yang penting dalam konteks dinamika perpolitikan di pemerintahan. Dengan adanya partisipasi politik oleh masyarakat, maka kepentingan masyarakat tersebut akan dapat terakomodir dan tersampaikan kepada pemerintah.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor yang penting untuk mewujudkan kepentingan masyarakat secara umum. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses atau pelaksanaan aktivitas politik. Beberapa contoh dalam partisipasi politik masyarakat adalah saat adanya program serap aspirasi dari pemerintah atau berpartisipasi pada saat

adanya pemilihan umum. Hal tersebut merupakan sebagian contoh kecil dalam pelaksanaan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam contoh lain adalah adanya masyarakat dalam keterlibatannya secara aktif menjalankan program pemerintah. Program pemerintah seperti adanya program pemerintah desa mandiri. Program desa mandiri ini merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adanya desa mandiri ini dapat mencerminkan sebuah keinginan masyarakat untuk maju dengan adanya karya atau produk yang dapat menunjang kemajuan Desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa dalam pembangunan desa mempunyai 4 aspek yaitu kebutuhan dasar, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa mandiri sendiri merupakan sebuah desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang mudah, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan sangat baik. Desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai IPD atau Indeks Pembangunan Desa lebih dari 75. Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Peranan tersebut dapat dilaksanakan jika desa tersebut dapat menjadi desa yang maju dan sejahtera. Pemerintah desa diberikan kebijakan dan kekuasaan tersendiri untuk dapat mengatur dan mengurus desanya supaya menjadi desa yang maju. Adanya otonomi desa maka pemerintah desa dapat menentukan suatu kebijakan yang tepat sesuai dengan karakteristik masyarakatnya sendiri. Hal ini dilaksanakan tentunya untuk mewujudkan yang namanya desa mandiri atau kemandirian desa.

Desa yang Mandiri memiliki kunci utama, yaitu pembangunan desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup masyarakatnya serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa bisa berbentuk fisik ataupun nonfisik dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar serta kemampuan masyarakatnya. Pembangunan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan akan membawa menjadi desa mandiri. Pembangunan ini sangat perlu diperhatikan dengan mengoptimalkan dan mendayagunakan demi terwujudnya suatu kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan harapan desa mandiri. Selain itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemberdayaan yang dapat dilaksanakan seperti mengembangkan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap, kemampuan serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia di desa. (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 12).

Pembangunan desa mandiri harus mengedepankan gotong-royong, kebersamaan, serta kekeluargaan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa mandiri tidak dapat lepas dari adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Masyarakat bisa memberikan masukannya atau aspirasinya kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai pembangunan yang sangat diperlukan di desa tersebut supaya dapat dimusyawarahkan secara bersama.

Beberapa strategi yang secara umum dipraktikkan dalam membangun kemandirian desa dari dalam. Pertama, membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Kedua, memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketiga, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Keempat, membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Desa Sambonggede merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Desa Sambonggede ini merupakan Desa yang sudah menjalin kerjasama dengan berbagai Lembaga atau instansi lainnya. Desa Sambonggede pernah menjadi Desa Anti Money Politik yang dicanangkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban. Selain itu, Desa Sambonggede juga merupakan salah satu Desa yang mendapat penghargaan sebagai Desa yang Inovatif dari Pemerintah Kabupaten Tuban. Desa Sambonggede pada 2019 menjadi salah satu Desa percontohan dan menjadikannya sebagai Desa Mandiri. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa dalam pembangunan desa dapat memenuhi 4 aspek yaitu kebutuhan dasar, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa mandiri sendiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Sambonggede dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar sudah lama dilakukan. Beberapa kebutuhan dasar yang sudah dilakukan oleh Desa Sambonggede ini menjadi nilai plus dalam mempertahankan desa mandiri. Kebutuhan dasar yang

dimaksud adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Masyarakat Desa Sambonggede berdasarkan data obeservasi yang dilakukan oleh peneliti, secara perekonomian 75% masyarakat desa Sambonggede berada di kelas menengah ke atas. Adapun masyarakat yang masih berada di kelas menengah ke bawah, setiap bulannya diberikan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang merupakan program dari Kementerian Sosial.

Selain aspek kebutuhan dasar, Desa Sambonggede juga sudah memenuhi aspek pelayanan dasar. Aspek pelayanan dasar ini menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan desa mandiri di antaranya: penyelenggaraan pendidikan, Pemenuhan fasilitas kesehatan, dan Pembangunan infrastruktur dasar. Berdasarkan dari indikator tersebut Desa Sambonggede sudah memenuhi semuanya, di antaranya adalah Pengembangan pos kesehatan desa atau Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu serta pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pelayanan dasar yang dilakukan oleh Desa Sambonggede tidak hanya dalam pembangunan fisik saja, namun dalam pelaksanaan operasional pelayanan yang sudah ini juga didukung oleh anggaran dana desa. hal ini dilakukan supaya bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Aspek lain yang juga sangat urgent dalam mewujudkan desa mandiri adalah aspek lingkungan. Aspek ini meliputi pemanfaatan, perlindungan dan perawatan lingkungan yang berada di Desa Sambonggede. Dalam sumberdaya alamnya, Desa Sambonggede mempunyai waduk air yang berada di dekat kantor desa, mempunyai pasar desa sebagai pusat perbelanjaan di Kecamatan Merakurak, dan juga memiliki lingkungan persawahan yang cukup luas.

Dalam memanfaatkan SDA desa ini, mengembangkan wisata air dan pasar desa

yang dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan desa. tidak cukup sampai di situ, Pemerintah Desa Sambonggede juga akan membangun sentra kuliner di sekitar wisata air untuk bisa memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Hal ini yang kemudian menjadikan Desa Sambonggede sebagai salah satu percontohan dalam mewujudkan desa mandiri. Pada Tahun 2018 Tim Program Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Merakurak memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Sambonggede. Aspek yang sangat penting selain dari tiga aspek tersebut adalah aspek Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagai upaya dalam mempertahankan desa mandiri, Pemerintah Desa Sambonggede melibatkan masyarakat dalam hal berbagai program yang sudah direncanakan. Sehingga hal ini yang menarik untuk dapat diteliti dan dikaji dalam hal partisipasi masyarakatnya. Sebagaimana diketahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan, maka hal yang dilakukan akan berkaitan erat dengan politik juga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk membahas gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, menggunakan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Pemilihan deskriptif kualitatif didasarkan dengan tujuan peneliti yaitu untuk mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat

dalam mempertahankan desa mandiri di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat dalam mempertahankan desa mandiri di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Penelitian ini secara khusus akan membahas tentang peran serta masyarakat dalam mempertahankan desa mandiri. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumen. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan wawancara untuk menjelajahi dan melacak sebanyak mungkin realitas fenomena yang terjadi di masyarakat.

C. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ferri Nicholas Hamisi dengan judul "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan (Suatu Studi terhadap musyawarah rencana pembangunan di kecamatan Jailolo)". Hasil dari penelitian ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat membawa keuntungan substansi, di mana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efisien, di samping juga akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengambil tema partisipasi politik, namun perbedaannya adalah pada faktor pengambilan kebijakan dan tempat penelitiannya yang berbeda. Manfaat penelitian ini adalah sama-sama memiliki konsep penelitian kualitatif. (Sumber: Jurnal Governance, Vol.5)

Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Endah dengan judul "Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam mempertahankan masyarakat mandiri dan

sejahtera". Hasil penelitian ini adalah dengan adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan lebih terarah. Kesamaan penelitian ini sama-sama memiliki konsep penelitian partisipasi politik, namun perbedaannya adalah pada partisipasi politik dalam pembangunan desa dan tempat penelitiannya juga berbeda. Manfaat penelitian ini adalah studi kajian pustaka dapat dimanfaatkan. (Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2854>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2022).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Rusmini dengan judul "Pelaksanaan Program Kebijakan Desa Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat". Penelitian ini memiliki kesamaan tentang pokok penelitian yang sama-sama meneliti desa mandiri serta metode penelitiannya yang sama. Namun perbedaannya adalah pada posisi pelaksanaan program dan partisipasi masyarakat serta tempat penelitian yang berbeda. Manfaat penelitian ini adalah dapat dijadikan rujukan dalam literatur desa mandiri dan konsep penelitian yang sama. (Sumber: Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.6. No.3 2020).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Abi Ridho Wicaksono dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Mandiri (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)". Penelitian ini memiliki konsep yang sama. Namun penelitian ini lebih cenderung kepada pembangunan desa sedangkan penelitian dalam tesis ini berkaitan dengan mempertahankan desa mandiri. Manfaat penelitian ini adalah dapat dijadikan rujukan dalam literatur desa mandiri dan konsep penelitian yang sama. (Sumber: Jurnal Administrasi Publik FIA UB Vol. 3 No.10 2015)

D. Kajian Teori

Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini: teori partisipasi politik, konsep masyarakat dan konsep desa mandiri.

Teori Partisipasi Politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik.

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran *deliberative democracy* atau demokrasi musawarah. Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Misalnya ungkapan pemimpin "Saya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masing-masing". Sebaliknya jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan. Dengan melihat derajat partisipasi politik warga dalam proses politik rezim atau pemerintahan bisa dilihat dalam spektrum:

1. Rezim otoriter - warga tidak tahu-menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik
2. Rezim patrimonial - warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh para pemimpin, tanpa bisa memengaruhinya.

3. Rezim partisipatif - warga bisa memengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya.
4. Rezim demokratis - warga merupakan aktor utama pembuatan keputusan politik.

Michael Rush dan Philip Altof (dalam Kartini Kartono, 1983:22) mengemukakan bahwa partisipasi politik ialah keterlibatan individu sampai bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Mirriam Budiardjo (1982:1) memberikan pengertian tentang partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*), kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Istilah partisipasi politik telah dipergunakan dalam berbagai arti. Apakah partisipasi politik itu hanya perilaku atau mencakup pula sikap-sikap dan persepsi-persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi (umpamanya informasi politik, persepsi seorang tentang toleransi, bagi urusannya sendiri suatu keyakinan bahwa orang dapat memengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintah). Jika partisipasi itu perilaku, apakah ia mencakup segala kegiatan yang mempunyai relevansi politik, tetapi di dalam esai ini didefinisikan partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan pada terwujudnya kebijakan itu (Maurice Duverger, 1981:19).

Wahyudi Kumorotomo (1999:112- 114) mengatakan bahwa partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warganya.

Secara umum corak partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi empat macam: 1. Partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*) 2. Partisipasi kelompok (*group participation*) 3. Kontak antara warga negara dengan pemerintah (*citizen government contacting*) 4. Partisipasi warga negara langsung Begitu juga halnya dengan Soetrisno (dalam Tangkilisan, 2005:320) partisipasi ditempatkan sebagai *style of development* yang berarti bahwa partisipasi dalam kaitannya dengan proses pembangunan haruslah diartikan sebagai usaha mentransformasikan sistem pembangunan dan bukan sebagai suatu bagian dari usaha *system maintenance*. Untuk itu, partisipasi seharusnya diartikan sebagai suatu nilai kerja bagi masyarakat maupun pengelola pembangunan sehingga partisipasi berfungsi sebagai mesin pendorong pembangunan. Dalam pembangunan, partisipasi semua unsur masyarakat dengan kerja sama sukarela merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan. Soehardjo (dalam Tangkilisan 2005:321).

Menurut Yadav yang dikutip dalam bukunya Unapdi (1980) ada empat macam kegiatan yang dapat menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat yaitu; 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan; 2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan; 3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan; 4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Meminjam pendapat Yustiningrum, (2015) partisipasi politik memiliki tiga faktor utama yang berpengaruh, yaitu; 1. Faktor psikologis yaitu, berkaitan erat dengan identifikasi individu atau masyarakat terhadap suatu partai politik; 2. Faktor ekonomi yaitu, pemikiran individu terkait kondisi ekonomi dirinya, keluarga, serta nasional; dan 3. Faktor sosiologis meliputi aspek agama, pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, serta tingkat ekonominya. Seluruh aspek ini berpengaruh pada partisipasi politik individu atau

masyarakat, khususnya dalam penentuan pemimpin atau pejabat pemerintahan.

Ada beberapa konsep yang perlu dipahami sebelum menjelaskan definisi pembangunan politik yaitu perubahan, pembangunan dan modernisasi politik. Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya (Ramlan Surbakti, 1992). Dengan demikian dapat dipahami bahwa perubahan politik meliputi semua ciri pembangunan dan modernisasi politik yang objeknya antara lain mencakup perubahan sistem nilai politik, struktur kekuasaan dan strategi kebijaksanaan umum. Di samping itu, konsep pembangunan politik mempunyai konotasi secara geografis, derivatif, teleologis, dan fungsional (Huntington dan Dominguez dalam Afan Gaffar, 1989).

Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik dan sebagainya. Itulah sebabnya pembangunan politik cenderung ditujukan untuk negara-negara sedang berkembang atas dasar pandangan bahwa di negara-negara sedang berkembang belum terjadi rasionalisasi, integrasi dan demokratisasi. Fenomena ini mengakibatkan timbulnya instabilitas politik yang memengaruhi kapasitas sistem politik. Karena itu dilaksanakan pembangunan politik untuk mengatasi permasalahannya.

Pembangunan politik dalam arti derivatif dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya. Karena itu pembangunan politik

berkaitan erat dengan bidang-bidang pembangunan lain seperti ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Misalnya, keberhasilan pembangunan ekonomi akan mendorong terjadinya peningkatan proses pembangunan politik, demikian pula sebaliknya. Kegagalan pembangunan dalam bidang politik juga akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Begitu pula terjadinya stagnasi pembangunan sosial akan menimbulkan keterbelakangan ekonomi dan politik, sebab dalam kondisi yang demikian masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi ataupun pembangunan politik. Karena itu, pada dasarnya diperlukan keseimbangan tertentu pada semua bidang pembangunan baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. Tingkat keseimbangan itu ditentukan oleh kondisi-kondisi yang ada dalam masing-masing bidang, dan juga oleh kondisi yang ada di luar setiap bidang.

Tidak tercapainya titik kesimbangan itu dengan sendirinya menimbulkan tekanan-tekanan terhadap bidang-bidang tertentu, yang pada akhirnya juga berdampak terhadap sistem secara keseluruhan (Syamsuddin, 1996). Salah satu perkembangan dalam ilmu politik adalah munculnya studi pembangunan politik sebagai bidang kajian tersendiri, di samping bidang kajian lainnya seperti: 1. Teori-teori politik, 2. Lembaga-lembaga politik, 3. Partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum, 4. Hubungan internasional. Para sarjana barat mengembangkan kajian ini dalam usaha mereka memahami perubahan sosial politik di negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu, konteks pembangunan politik cenderung ditujukan pada negara-negara sedang berkembang dengan asumsi bahwa di negara-negara tersebut belum berjalan rasionalisasi, integrasi dan demokratisasi.

Menurut Hungtinton dan Dominguez konsep pembangunan politik dikatakan

mempunyai konotasi secara geografis, deveriatif, teologis dan fungsional; 1. Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik dan sebagainya; 2. Pembangunan politik dalam arti derivative dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya; 3. Pembangunan politik dalam arti teologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Juga termasuk di dalamnya tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional. (Hungtinton dan Ramlan Surbakti, 1992); 4. Pembangunan politik dalam makna fungsional diartikan sebagai suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu negara misalnya Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi konstitusional.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)". Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan ke arah

yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana". Kepustakaan atau literatur pembangunan politik menekankan percabangan politik dari pembangunan dan kecenderungan membedakan pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Literatur ini di kelompokkan ke dalam tiga tipe; 1. yang satu berasosiasi dengan gagasan-gagasan demokrasi, 2. berfokus pada aspek-aspek pembangunan dan perubahan politik; dan 3. menguji krisis konsekuensi-konsekuensi pembangunan politik. Secara tradisional para ilmuwan politik telah meluncurkan pertanyaan-pertanyaan tentang demokrasi. Adanya partisipasi pluralistik, sistem-sistem multi partai, dan politik persaingan maupun stabilitas politik dan penghindaran ketegangan yang berlebihan.

Pembangunan demokrasi bagaimanapun juga harus diimbangi dengan pemerintahan yang kuat dan kewenangan teratur. Dalam hal ini Russel Fitzgibbon (1956) mengumpulkan opini-opini para spesialis Amerika Selatan dengan jumlah kriteria untuk mengukur demokrasi politik. Pertanyaan-pertanyaan berkisar pada derajat kebebasan pers, sifat-sifat sistem partai, kebiasaan memberikan suara, standar hidup, dan sebagainya. Dalil-dalil demokrasi ini terus-menerus memasuki konsepsi pembangunan politik. Upaya Almond (1965) untuk mengikat sistem-sistem ortodoks dan teori budaya pada pembangunan politik merupakan contoh tidak berubahnya pandangan terhadap kenyataan tersebut. Dalam *aspects of political development*, Pye (1966 khususnya bab 4) mengungkapkan bias-biasnya terhadap demokrasi barat sekaligus mengenali adanya keragaman definisi, yang umumnya diasosiasikan dengan perubahan. Banyak penulis menemukan bahwa upaya-upaya untuk mengidentifikasi penjelasan pembangunan yang netral adalah bersifat statis, dan ini menjadi perhatian diletakkan pada perubahan.

Krisis partisipasi adalah "sebuah konflik yang terjadi ketika elit yang memerintah memandang permintaan dan perilaku-perilaku individu dan kelompok yang mencoba berpartisipasi dalam sistem politik sebagai tidak berlegitimasi" (Binder 1971: 187). Krisis penetrasi dicirikan oleh "tekanan kepada elit yang memerintah untuk membuat adaptasi atau inovasi institusional dengan keragaman tertentu. Krisis distribusi dianalisis dalam pengertian masalah-masalah seperti ideologi, sumber daya fisik dan manusia, serta lingkungan institusional.

Teori Pembangunan Desa

Rostow (1971) menyatakan, bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci di antara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis. Menurut Hanafiah (1992), pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional pertahun meningkat. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Menurut Haeruman (1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu: a. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada

potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. b. Sisi yang lain, memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan. c. Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 72 tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Tujuan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan antar pelaku pembangunan.
- b. Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah pusat, melalui kementerian/ lembaga ramai-ramai membuat program di desa yang identik dengan sebutan program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Program-program yang masuk ke desa tersebut bersifat fragmented tidak hanya dalam kerangka acuan kerjanya tapi sumber pendanaannya. Sekali lagi, dalam konteks ini,

desa hanya sekadar sebagai lokasi bukan arena bagi keikutsertaan sumber daya dan kelembagaan lokal dalam pembangunan. Masing-masing program memiliki *court of conduct*, aturan main dan pelembagaan project berbeda, tapi bermuara pada lokus yang sama yaitu desa sebagai lokasi. Akibatnya, skema pengelolaan programnya bersifat intervensionis. Skema program mengemudikan model pemenuhan kebutuhan prioritas hidup masyarakat, jawaban atas peta persoalan lokal hingga pilihan pengelolaan sumber daya lokal.

Ada beberapa strategi yang secara umum dipraktikkan dalam membangun kemandirian desa dari dalam. Pertama, membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Proses pembentukan bangunan warga dan organisasi masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif masyarakat. Kedua, memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban merupakan salah satu desa yang sudah dinyatakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai desa mandiri. Penetapan ini tentunya dinilai dengan adanya indikator-indikator yang sudah ditentukan. Desa Sambonggede ini selain menjadi desa mandiri juga sudah dinobatkan sebagai desa percontohan pada Tahun 2018. Sebagai desa percontohan, Desa Sambonggede memiliki berbagai inovasi desa yang sudah dibangun, seperti adanya wisata kolam renang pasar

desa. Desa Sambonggede yang sudah dijadikan sebagai desa mandiri pada tahun 2021 memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 853 dengan kategori mandiri. Adanya IDM yang tinggi ini tentu diukur dari berbagai bidang mulai dari dimensi sosial, dimensi ekonomi sampai dengan dimensi infrastruktur.

Desa Sambonggede bisa dikatakan desa yang berdiri tegak tanpa menggantungkan bantuan dari Pemerintah. Sebab, desa tersebut sudah bisa mengelola adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang salah satunya bersumber dari hasil pendapatan desa sendiri. Desa mandiri pada dasarnya bisa memberikan manfaat untuk para masyarakatnya baik itu dari segi perekonomian, pelayanan sampai dengan adanya kebijakan yang pro terhadap masyarakat. sebab dengan adanya desa mandiri ini masyarakat bisa terbantu dalam meningkatkan perekonomian, kemudahan dalam pelayanan dan bisa turut serta dalam menentukan kebijakan pemerintah desa.

Desa mandiri memiliki kunci utama yaitu pembangunan desa yang berorientasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Desa Sambonggede dalam mempertahankan desa mandiri sudah melakukan berbagai kegiatan atau program yang dimilikinya. Mulai dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan, pelayanan sampai dengan peningkatan infrastruktur. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui adanya konsep desa mandiri, Partisipasi masyarakat dalam mempertahankan desa mandiri dan Implikasi adanya desa mandiri. Bentuk desa mandiri di Desa Sambonggede merupakan sasaran utama dalam pembangunan masyarakat di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak. Desa mandiri itu cerminan dari keinginan masyarakat yang sangat kuat untuk menjadi maju dari berbagai program pemerintah desa. Program pemerintah desa diharapkan bisa membantu

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Bentuk yang dicanangkan oleh Desa Sambonggede dalam mempertahankan desa mandiri tentunya dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berperan secara aktif dalam program-program pemerintahan desa.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif, solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Bintoro (1995:220) berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. Keterlibatan aktif ini juga disebut partisipasi, ada tiga aspek dalam partisipasi, yaitu: Pertama, keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik tetapi juga dalam proses hubungan sosial antar kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Paling sedikit suatu rencana harus peka terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat. Sehingga dengan demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan rasa solidaritas nasional dan solidaritas sosial. Kedua, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain. Pada pokoknya arah kegiatan masyarakat yang mendukung peningkatan tabungan, dan investasi, dan dengan demikian pembentukan

modal. Suatu sistem pemungutan pajak yang adil dan merata dapat lebih menggerakkan kesediaan membayar pajak. Ini adalah bentuk partisipasi mutlak dalam bernegara, apalagi bila dalam pembangunan. Ketiga, adalah keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongan-golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka, melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu. Misalnya dalam hal ini dilakukan dalam bentuk pembangunan daerah-daerah terbelakang, kebijaksanaan, dan program-program pembangunan yang merangsang keterlibatan produktif golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan program-program yang disebut *community development*."

Desa mandiri yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Desa Sambonggede bertumpu pada trisakti desa, yaitu karsa, karya dan sembada. Adanya trisakti desa ini dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah Desa Sambonggede dalam mempertahankan Desa Mandiri. Sebab jika trisakti desa ini bisa tercapai maka desa yang mandiri juga akan terwujud. Trisakti desa ini dicanangkan dengan meliputi adanya berbagai bidang, di antaranya sosial, ekonomi, budaya, pelayanan dan juga infrastruktur. Konsep trisakti desa ini bisa menjadikan desa meningkat dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa dan bisa meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Sehingga dalam mempertahankan desa mandiri yang ada di Desa Sambonggede selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi program-program pemerintah desa.

Partisipasi masyarakat di Desa Sambonggede bisa berupa perseorangan, kelompok organisasi atau juga bisa melewati kelompok Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Setiap orang atau kelompok dalam mengikuti pro-

gram pemerintah untuk mempertahankan desa mandiri tentunya memiliki peranan yang berbeda-beda. Sehingga dalam mempertahankan desa mandiri di Desa Sambonggede partisipasi masyarakat sangat kompleks. Desa Sambonggede dalam mencapai desa mandiri memiliki berbagai indikator kinerja yang sudah dinilai, diantaranya dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi ekologi, aktivitas desa, kerjasama desa dan perdesaan, sumber pendapatan desa, aset atau kekayaan desa, total belanja APBDes, sampai dengan letak geografinya.

Berikut penjelasan tentang indikator dalam konsep pembangunan desa mandiri di Desa Sambonggede: 1. Dimensi sosial dalam konsep pembangunan desa mandiri ini memiliki kriteria yang harus dinilai atau standart untuk menjadi desa mandiri. Adapun kriteria yang dinilai dalam dimensi sosial ini yaitu bidang kesehatan yang memiliki cakupan penilaian tentang ketersediaan saran kesehatan, rumah sakit, rumah sakit bersalin, sampai dengan adanya bidan yang praktek di desa tersebut. Selain itu, ada juga bidang pendidikan yang memiliki cakupan penilaian tentang jumlah Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Indikator lain adalah akses pengetahuan yang harus dimiliki oleh desa. Akses pengetahuan ini memiliki aspek penilaian tentang perpustakaan baca atau taman baca untuk anak-anak di desa tersebut.

Kemudian keamanan warga yang memiliki aspek penilaian tentang adanya fasilitas untuk menjaga keamanan di desa tersebut. Aspek lain yang dinilai juga ada kesejahteraan warga, pemukiman yang layak huni, ketersediaan air bersih, akses sanitasi, akses listrik, serta akses informasi dan komunikasi. Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Sambonggede mengatakan bahwa aspek sosial ini sudah mayoritas dipenuhi oleh Pemerintah Desa Sambonggede, sehingga dalam

penilaian indeks desa membangun sudah sangat tinggi. “Nilai IDM Desa Sambonggede sudah tinggi dengan adanya fasilitas yang hampir terpenuhi semuanya. Namun masih ada beberapa aspek sosial yang belum bisa dipenuhi seperti adanya informasi melalui website resmi desa. Sebab website resmi desa ini sudah beberapa kali mengalami *trouble*. Sehingga dalam pelayanan informasi hanya secara manual atau datang langsung ke kantor desa di jam pelayanan” (Hasil Wawancara Pada 3 Juni 2022).

1. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi dalam konsep desa mandiri memiliki beberapa indikator yang harus dicapai, di antaranya adalah keragaman produksi masyarakat, akses perdagangan masyarakat, akses distribusi logistik, akses lembaga keuangan, akses lembaga perekonomian, dan juga keterbukaan wilayah. Pencapaian indikator dalam dimensi perekonomian ini tentunya salah satu yang harus dimiliki oleh Desa supaya bisa menjadi desa yang mandiri adalah harus memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah benar-benar berjalan dan bisa memberikan pemasukan kepada desa. Sehingga aspek penilaian paling penting adalah adanya ketersediaan BUMDes dalam mempertahankan desa mandiri.

2. Dimensi ekologi

Dimensi Ekologi ini menjadi salah satu indikator penting dalam menjadikan desa sebagai desa mandiri. Dimensi ekologi ini memiliki aspek penilaian tentang kondisi lingkungan dan potensi bencana. Aspek penilaian tersebut mencakup tentang adanya lingkungan yang bersih dan menyehatkan bagi masyarakat, selain itu juga adanya infrastruktur yang harus dimiliki desa untuk mencegah terjadinya banjir atau bencana alam.

3. Aktivitas Desa

Dimensi aktivitas desa ini menjadi salah satu indikator dalam membangun desa mandiri. Aspek dalam dimensi desa ini membicarakan tentang kegiatan-kegiatan desa, ketersediaan pendamping desa dan juga adanya pendamping profesional dari luar desa. Pendampingan profesional desa yang dimiliki harus berdasarkan berbagai bidang, di antaranya ekonomi, sosial, budaya, Pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

4. Kerjasama Desa dan Perdesaan

Indikator tentang kerjasama desa dan perdesaan ini memiliki aspek penilaian tentang bagaimana kerjasama antar desa dalam satu kecamatan, antar desa di luar kecamatan, BUMDesa dengan Pihak ketiga dan juga desa dengan pihak ketiga. Hal ini yang kemudian dinilai dari aspek indikator kerja sama desa dan perdesaan.

5. Sumber Pendapatan Desa

Sumber pendapatan desa menjadi indikator dalam penilaian desa mandiri, sumber pendapatan desa ini menjadi hal krusial sebagai bidang pemasukan desa. Selain itu, metode pengelolaan pendapatan desa juga menjadi aspek dalam Penilaian sumber pendapatan desa.

6. Letak Geografis

Letak geografis desa menjadi salah satu hal penting untuk dinilai dalam desa mandiri. Letak geografis ini dinilai dari aspek jarak antara desa ke kantor kecamatan, desa ke kantor kabupaten dan posisi desa yang strategis juga menjadi aspek penilaian tersendiri.

Partisipasi lain yang bisa dilaksanakan oleh kelompok adalah berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sambonggede. Kelompok masyarakat dalam proses mempertahankan desa mandiri di Desa

Sambonggede dalam partisipasinya bisa dilaksanakan dengan memberikan masukan kepada pemerintah desa. Hal ini dilaksanakan oleh pemerintah desa supaya bisa mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan evaluasi pembangunan. Pemanfaatan ini bisa dilaksanakan dengan berpartisipasi secara langsung dalam menggunakan atau memanfaatkan seluruh program dan infrastuktur yang sudah dibangun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil wawancara dari Ketua Karang taruna Desa Sambonggede Kecamatan Merkurak Kabupaten Tuban mengatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan desa selalu melibatkan karang taruna dalam beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Pemuda. "Kegiatan Desa yang berkaitan dengan kepemudaan bahwa pemerintah Desa Sambonggede selalu mengajak kita untuk turut andil dalam perencanaan, pelaksanaan dan bahkan para pemuda karang taruna juga dimasukkan dalam jajaran panitia" (Hasil Wawancara 4 Juni 2022).

Kemudian pada bidang usaha desa, Pemerintah Desa Sambonggede juga mengikutsertakan jajaran pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan atau usaha yang sedang dijalankan oleh pemerintah desa. Hal ini diungkapkan oleh ketua BUMDes Desa Sambonggede dalam wawancaranya. "Usaha Desa dikelola oleh BUMDes yang berada di bawah koordinasi pemerintah desa dan kami secara langsung ikut serta dalam pengelolannya. Seperti adanya wisata kolam renang ataupun pasar desa" (Hasil Wawancara 4 Juli 2022). Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang ada di Desa Sambonggede berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal ini diungkapkan oleh sekretaris desa dalam wawancaranya. "Partisipasi masyarakat yang sudah dilaksanakan sangat membantu

Pemerintah Desa dalam menjalankan program-programnya. Secara khusus terkait dengan peningkatan nilai IDM. Sehingga Desa Sambonggede dinyatakan sebagai Desa yang Mandiri" (Hasil Wawancara 3 Juli 2022).

Partisipasi dalam pengambilan keputusan juga bisa diikuti oleh perseorangan dengan memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait dengan mempertahankan desa mandiri. Pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sambonggede ini awalnya dilaksanakan dengan musyawarah desa (Musdes). Pada Musdes ini setiap orang bisa berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pokok bahasan yang sedang dirapatkan. Selain itu, bentuk partisipasi juga bisa dilaksanakan dengan memberikan masukan melalui media sosial atau media grup yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Desa Sambonggede. Partisipasi lain yang bisa dilaksanakan oleh perseorangan adalah dalam pelaksanaan kegiatan. Bentuk pelaksanaan kegiatan ini bisa secara langsung diikuti oleh Individu dalam mensukseskan setiap program yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Hasil wawancara yang dilaksanakan dengan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sambonggede secara individu juga turut andil dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. "Kalau ada kegiatan apapun yang dilaksanakan pemerintah desa, saya juga selalu datang. Meskipun tidak masuk dalam jajaran organisasi yang ada di Desa. Ini merupakan bentuk dukungan saya kepada pemerintah desa supaya lebih baik dari tahun ke tahun" (Hasil wawancara tanggal 5 Juli 2022).

Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan juga bisa dilaksanakan oleh perseorangan. Bentuk partisipasi ini bisa dilakukan dengan cara ikut serta secara langsung memantau dan mengevaluasi setiap program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Kemudian dalam menyampaikan pendapatnya, masyarakat bisa secara

langsung datang di kantor desa atau melalui grup media sosial yang sudah dibuat oleh pemerintah desa. Hal ini dilakukan supaya setiap masyarakat yang tidak terakomodir bisa ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Partisipasi lainnya adalah dalam hal pemanfaatan hasil pembangunan, partisipasi ini bisa dilaksanakan dengan ikut serta dalam memanfaatkan hasil pembangunan pemerintah Desa. Seperti ikut serta dalam mengunjungi pemandian air yang merupakan salah satu badan usaha milik desa. Selain itu, setiap masyarakat secara individu juga bisa ikut serta secara langsung dalam mengembangkan usahanya di wisata-wisata yang sudah dibuat oleh pemerintah desa. Contohnya setiap warga bisa ikut berdagang di wisata air atau pasar desa yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa.

Hasil wawancara yang dilaksanakan dengan masyarakat Desa Sambonggede secara individu juga mengatakan bahwa mereka juga ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan cara memanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah desa. "Fasilitas yang sudah ada saya manfaatkan dengan cara berkunjung ke beberapa wisata yang sudah dibangun oleh pemerintah desa. Ini merupakan terobosan bagus oleh pemerintah desa, sehingga kita harus mendukung dengan cara datang dan meramaikan fasilitas yang sudah dibangun" (hasil wawancara 5 Juli 2022).

Hal lain juga diungkapkan oleh sekretaris desa bahwa dalam partisipasi masyarakat baik itu kelompok maupun individu masyarakat selalu ikut serta dan meramaikan kegiatan atau fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah desa, "Baik itu kelompok maupun individu masyarakat selalu antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Hal ini tentu akan menunjang adanya indeks pembangunan desa dan lebih penting lagi akan selalu

mendukung kemajuan desa supaya lebih mandiri" (Hasil wawancara 3 Juli 2022).

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Partisipasi politik mempunyai peranan yang penting dalam konteks dinamika perpolitikan di pemerintahan. Adanya partisipasi politik oleh masyarakat, maka kepentingan masyarakat dapat terakomodir dan tersampaikan kepada pemerintah. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada partisipasi masyarakat maka kepentingannya tidak akan terakomodir. Sehingga partisipasi masyarakat menjadi faktor yang penting untuk mewujudkan kepentingan masyarakat secara umum. Pemerintah Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak dalam mempertahankan desa mandiri tidak lepas dengan partisipasi masyarakat, baik itu kelompok maupun individu. Partisipasi tersebut dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Terdapat empat bentuk partisipasi masyarakat dalam mempertahankan desa mandiri yaitu, partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Sambonggede tersebut sangat berefek pada setiap program atau rencana pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah desa. Partisipasi masyarakat ini bisa dikatakan sangat berpengaruh dalam mempertahankan desa mandiri di Desa Sambonggede. Sebab dengan adanya partisipasi ini, seluruh program bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga indeks pembangunan desa hasil penilaian dari pemerintah yang diberikan kepada Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak sebesar 852 pada tahun 2022 ini. Sehingga Desa Sambonggede dinyatakan sebagai desa yang mandiri.

2. Saran

Partisipasi masyarakat dalam mempertahankan desa mandiri di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak memerlukan tindakan lanjut yang lebih mendalam. Sehingga saran pada penelitian yang akan datang objek penelitian lebih kompleks dan lebih detail. Pada pokok penelitian tentang desa mandiri masih banyak hal-hal yang perlu dibahas dan lebih menarik untuk dijadikan penelitian.

Daftar Pustaka

- Alfin, Muhammad, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul)*. 2020. <http://repository.umsida.ac.id/handle/123456789/35573>. diakses pada Tanggal 17 Desember 2021 Pukul 14.10 WIB.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1998. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Masagung
- Budiadjo Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Chilcote, Ronald H. *Theories of Comparative Politics the Search for a Freedom*. Colorado: Westview Press Bolder. 1981.
- Effendy, Sofian. 2001. *Bahan Kuliah Studi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MAP Universitas Gadjadara.
- Endah, Kiki. Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol 1, No 4 (2015). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2854>. diakses pada tanggal 2 Juni 2022.
- Frank, Andre Gunder. 1966. *The Development of underdevelopment*. New York: Monthly Review Press.
- Hamisi, Ferri Nicholas. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan (Suatu Studi terhadap musyawarah rencana pembangunan di Kecamatan Jailolo). *GOVERNANCE*, [S.l.], v. 5, n. 1, feb. 2013. ISSN 2088-2815. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1529>. Date accessed: 2 june 2022.
- Huntington, Samuel P. 1976. *No Easy Choice: political participation in developing countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Irawan, N. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta :Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Irfan Islamy. 1984. *Prinsip-Prinsip Pembuatan Kebijakan Negara*. Jakarta: Aksara Baru..
- Kautsky, Karl. 1964. *The Dictatorship of the proletariat*. Ann Arbor. University of Michigan.
- Kurniawan, B. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Magdoff, Harry. 1969. *The age of Imperialism: The Economics of U.S. Foreign Policy*. New York: Monthly Review Press.
- Maschab, M. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Persada Nistrasi Kumorotomo, Wahyudi. 1999. *Etika Admiegara*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Rush, Michael dan Philip Altoft. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Rusmini. 2020. Pelaksanaan Program Kebijakan Desa Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*,

- Vol 6, No 3. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3997>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2022.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan & Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wicaksono, Abi Ridho. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Mandiri (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. FIA UB Vol. 3 No. 10. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1026>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2022.
- Winarno, budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.